

AL QURAN MENJAWAB TANTANGAN PLURALISME TERHADAP KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Nury Firdausia

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang,
Telp. 085233340297 email: firdausianury@gmail.com

Abstract

Pluralism is a challenge which must be dealt by lofty and wise action. Actually, peace culture had an accurate base dealing with pluralism, then become solution to keep sturdy coalescence and nation. The challenge of pluralism should be an opportunity to exhibit Islamic existence through al Quran and Hadits as a manual and guide in Inonesian social life. The plurailism in Indonesia could be solved by having Al Quran and Hadits as a references to think globally and inclusively, not exclusively. People with government should cooperate each other to face a challenge of pluralism, until no more conflict on behalf a religion.

Pluralisme adalah kemajemukan yang harus dihadapi dengan sikap arif dan bijaksana. Budaya perdamaian sebenarnya telah memiliki landasan yang kuat untuk menghadapi pluralisme, sehingga menjadi solusi untuk tetap menjaga kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa. Tantangan pluralisme seharusnya menjadi peluang untuk menunjukkan eksistensi Islam, dengan menjadikan al Quran dan Hadits sebagai pedoman dan tuntunan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Solusi untuk menghadapi pluralisme di Indonesia adalah dengan menjadikan Al Quran dan Hadits sebagai rujukan untuk berpikir global dan inklusif bukan eksklusif. Sudah seharusnya masyarakat bersama seluruh elemen pemerintah menjalin kerjasama yang serius untuk menghadapi tantangan pluralisme, agar tidak terjadi lagi konflik yang mengatasmakan agama.

Key word: Al Quran, pluralism, harmony, religion

Pendahuluan

Seiring dengan terbukanya kran demokrasi di era reformasi yang ditandai dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi, muncul pula istilah *pluralisme* yang lalu menjadi perdebatan yang tidak kunjung selesai, muncul sebuah pertanyaan besar, apa sesungguhnya *pluralisme* itu?

Oleh beberapa kalangan, pluralisme dinilai sebagai paham yang menyedatkan dan mengikis keyakinan umat beragama. Namun, di sisi lain pluralisme adalah sebuah keniscayaan dan perbedaan pandangan ini, sedikit banyak telah mempengaruhi rasa toleransi antar umat beragama di Indonesia.

Akhir-akhir ini, kekerasan menjadi fenomena yang marak dan sering dengan mudah meledak di tanah air tercinta Indonesia. Pemicunya pun tentu beragam. Mulai dari persoalan perebutan lahan, perbatasan desa, perang antar-kampung, perlawanan (upaya penutupan) terhadap perusahaan besar yang berusaha menghentikan penghidupan masyarakat, upaya melawan (kesewenangan) pihak aparat keamanan atau pemerintahan, dan yang terakhir namun bukan yang terkecil, perbedaan kecenderungan keagamaan yang dijadikan alasan untuk melakukan tindak kekerasan. Maka, apapun menjadi sasaran amarah, tempat ibadah, rumah penduduk dan bangunan dihancurkan, dibakar, dan korban pun berjatuhan.

Menilik persoalan ini dengan cara lebih seksama, dengan mencari akar masalah satu demi satu, tentu memerlukan waktu dan ruang yang memadai. Karenanya, fokus pembahasan ini pada satu faktor saja, yaitu alasan keagamaan yang dijadikan pemicu untuk melakukan tindak anarkis itu.

Sebenarnya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat toleran dan mampu menghormati perbedaan, apapun latar perbedaan itu. Luas wilayah Nusantara yang panjangnya saja hampir sama dengan panjang daratan Eropa, dengan aneka suku, bahasa, dan agama, setidaknya menjadi bukti bahwa bangsa ini memang rela hidup bersama dalam perbedaan. Kalau tidak, maka tidak akan mampu bertahan selama ini, kendati hari-hari ini masyarakat Indonesia memang pantas khawatir dengan keutuhan negeri ini.

Benar, jika ada yang mengatakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang terkenal ramah kepada siapapun; bahkan ini menjadi *icon* dan kebanggaan. Karena itu, Indonesia pantas tersentak, bingung, dan bertanya-tanya; apa sebenarnya yang terjadi dengan anak bangsa ini? Mengapa sekarang mereka cenderung bertambah beringas, sangat sensitif dan tidak lagi toleran?

Sebagian pengamat mengatakan bahwa penyebab dan akar persoalannya adalah aspek keadilan, ekonomi, dan kemiskinan. Masyarakat Indonesia yang

masih terpuruk secara ekonomi menjadi rentan dengan isu apapun karena merasa terpinggirkan dan terdesak penghidupannya. Dalam kasus di Mesuji Lampung, hal ini sangat terlihat, bagaimana masyarakat menolak kehadiran perusahaan (asing) karena dianggap akan mengancam sumber penghidupan mereka. Begitu juga dengan apa yang terjadi di Bima, Nusa Tenggara Barat, saat ribuan masyarakat dari beragam tempat datang secara bersama-sama dan membakar kantor bupati di tengah kota karena sang bupati dianggap melindungi dan bekerja sama dengan perusahaan besar (asing). Di berbagai tempat di tanah air, kondisi serupa berlangsung dengan taraf yang berbeda-beda, tetapi dengan latar belakang yang hampir sama.

Faktor lain yang menjadi pemicu adalah alasan (kecenderungan) keagamaan yang berbeda. Sebut saja misalnya kasus Sampang, Jawa Timur. Karena merasa ada sebagian anggota masyarakatnya yang berbeda sedikit dalam pola keyakinan dan tatacara ibadah, maka kelompok massa yang sudah terprovokasi itu lantas melakukan pembakaran atas sebuah pesantren dan beberapa rumah milik masyarakat yang masih satu desa. Ini bukanlah yang pertama dan tampaknya (mudah-mudahan tidak terjadi) bukan yang terakhir, mengingat masyarakat yang sensitif dan mudah tersulut emosi, sehingga cenderung mengekspresikan kemarahan dengan berbagai macam tindakan anarkis, tingginya kecenderungan masyarakat untuk mengekspresikan kemarahan dengan cara-cara kekerasan belakangan ini. Masih teringat, hal serupa telah beberapa kali terjadi di Bangil, atau kasus Ambon dan Poso yang dilatarbelakangi oleh perbedaan agama.

Menilik peristiwa-peristiwa di atas secara lebih cermat, sebagaimana telah *mafhum* bagi semua, mustahil diperoleh pembenarannya dari teks-teks keagamaan. Dalam agama dan mazhab atau aliran manapun, penggunaan kekerasan bukanlah suatu solusi pemecahan masalah. Nabi Muhammad saw, membangun sebuah paradigma Islam yang sangat ramah sehingga mampu menjadi rahmat bagi semesta (*rahmatan lil'alam*).

Begitu juga jika dilihat dalam kultur bangsa Indonesia, atas nama apapun kekerasan tidak pernah mendapat tempat. Tidak antar-agama, tidak antar-mazhab, tidak pula antar-suku. Bahkan kalau diperhatikan peristiwa yang terjadi di Ambon dan Poso, puluhan atau bahkan ratusan tahun sebelumnya mereka telah hidup dalam harmoni. Bukan itu saja, mereka bahkan membangun budaya persatuan dan kerjasama dengan ciri adat masing-masing. Ya, hidup bersama dalam perbedaan bukanlah sesuatu yang baru bagi bangsa Indonesia. Bahkan dalam taraf tertentu, Indonesia “mengajari” dan menjadi contoh

bagi bangsa-bangsa lain dalam membangun toleransi dan persatuan. Lalu, bagaimana menyikapi kebersandingan nilai keislaman dan keindonesiaan di tengah arus pluralisme? Al Quran akan menjawab tantangan pluralisme antar umat beragama.

Definisi Pluralisme

Pluralisme berasal dari kata *plural* yang bermakna jamak atau banyak. Pluralisme adalah teori yang menyatakan bahwa realitas terdiri dari banyak substansi (Partanto dan Al Barry, 2001: 602). Dari definisi inilah, maka dapat dipahami bahwa pluralisme adalah sebuah realitas dari keragaman dan perbedaan, namun yang perlu digaris bawahi adalah pluralisme tidak dapat dipahami dalam pengertian mutlak, terutama dalam kehidupan umat beragama. Pluralisme dalam kaitan kebebasan harus dipandang dalam persepsi yang sama bahwa tidak ada kebebasan yang mutlak.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk (*plural society*) dan multikultural (*multicultural society*). Pluralisme masyarakat adalah salah satu ciri utama bangsa Indonesia yang multikultural, yaitu suatu konsep yang mengedepankan pluralisme budaya. Budaya adalah istilah yang merujuk kepada semua aspek simbolik yang dapat dipelajari dalam masyarakat, termasuk kepercayaan, seni, moralitas, hukum dan adat-istiadat.

Pada masyarakat multikultural, konsepnya ialah bahwa di atas pluralisme masyarakat itu hendaknya dibangun satu rasa kebangsaan dengan tetap menghargai, mengedepankan dan membanggakan pluralisme masyarakat itu (Taufiqurrahman, 2013: 172). Karenanya, pluralisme di Indonesia adalah sebuah realita dari keragaman masyarakat dan budaya. Ungkapan *Bhinneka Tunggal Ika* adalah simbol yang telah disepakati bersama sebagai sebuah identitas dan kekayaan Nusantara.

Pluralisme dalam Perspektif Al Quran

Sejatinya pluralisme telah memiliki landasan teologis yang cukup kokoh dalam nilai dan ajaran Islam, tidak hanya dalam tataran teoritis seperti yang mewujud dalam redaksi primer al Quran surat *al Hujurat* ayat 13:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”.

Pada ayat di atas, terdapat kalimat **ولا تسبوا الذين**, Syaikh Ali as Shobuni menafsirkan dengan kalimat:

ولا تسبوا الذين يعدلون (يعدلون) أي يسبون به غيره ويجعلون له عدلا وشركا

“Janganlah memaki mereka yang menyembah selain Allah, mereka menyembah Tuhan mereka menjadikan sesembahan itu tandingan dan sekutu”.

Senada dengan hal tersebut, dalam sebuah riwayat diceritakan:

قال عبد الرزاق:

انبأنا معمر عن قتادة قال: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فيسب الكفار الله, فأنزل الله هذه الآية

“Abdu al Rozaq berkata: Mu’ammarr mengabarkan kepada kami, dari Qotadah, ia berkata: Kaum muslimin telah menghina sesembahan orang kafir, lalu orang kafir itupun menghina Allah, maka turunlah ayat ini (Al An’am: 108)” (as Suyuti: 1994: 141).

Riwayat dan penafsiran di atas telah menggambarkan bahwa sifat melecehkan, apalagi menghina sesembahan (Tuhan) agama orang lain, sangat dilarang dalam Islam. Karena ketika seorang muslim menghina Tuhan seorang non muslim, maka ia akan menghina Allah, *na’udzubillah*. Semoga hal ini tidak pernah terjadi lagi seperti pada saat itu.

Dengan demikian, untuk membina persatuan dan kesatuan di negeri tercinta ini, langkah awalnya adalah harus saling mengenal, saling menghargai, dan bertoleransi di antara kita. Bukan saling menutup diri, melecehkan, menghina, membangga-banggakan kelompok, suku bangsa, maupun daerah masing-masing.

Tantangan Pluralisme Terhadap Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Indonesia merupakan sebuah bangsa majemuk (*plural society*) dengan ragam budaya dan agama merupakan realitas empirik yang tidak dapat dipungkiri. Heldred Geerts secara detail menggambarkan heterogenitas

bangsa Indonesia dengan mengatakan bahwa terdapat lebih dari tiga ratus kelompok etnis yang berbeda-beda di Indonesia, masing-masing kelompok mempunyai identitas budayanya sendiri-sendiri, dan lebih dari dua ratus lima puluh bahasa yang berbeda-beda yang dipakai. Hampir dari semua agama besar dunia diwakili, selain dari agama-agama asli yang jumlahnya banyak sekali (Azra dkk, 2005: 184).

Kemajemukan memang bukan merupakan fenomena yang baru untuk bangsa Indonesia. Beberapa pakar bahkan menyebut Indonesia sebagai *locus classicus*, yaitu sebuah tempat klasik dari pluralisme, dimana pluralisme sangat mewarnai tradisi politik dan praktek keagamaan orang muslim di Indonesia. Oleh karena itu, tak heran jika John Venable, seorang pengamat politik Inggris, menciptakan dan menerapkan istilah *plural society* khusus untuk Asia Tenggara, terutama Malaysia, Burma dan Indonesia (Kleden, 2000: 169).

Heterogenitas yang demikian tersebut, pada satu sisi memang menjadi nilai profetik tersendiri bagi kekhasan identitas bangsa Indonesia, namun pada sisi lain menyimpan potensi konflik yang begitu besar. Jika tidak disikapi secara konstruktif, maka instrumen heterogenitas masyarakat Indonesia yang terdiri dari perbedaan agama, etnik, dan kelompok sosial itu bisa menjadi persoalan krusial bagi proses integrasi sosial. Hal ini diamini oleh antropolog terkenal asal Amerika, Robert W. Hefner, yang mengatakan bahwa kemajemukan memang seringkali menjadi sumber ketegangan sosial. Kasus Ambon, Sampang serta beberapa daerah lainnya menjadi manifestasi empirik yang menjelma sebagai indikasi penting bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami gejala konflik yang luar biasa karena heterogenitas agama yang gagal berdialog dengan baik dalam dinamika masyarakat dan paradigma beragama eksklusif menjadi hegemoni dalam *mindset* sebagian masyarakat Islam Indonesia.

Dalam rentangan catatan sejarah Islam, konflik yang dihasilkan oleh eksklusivisme negatif sebenarnya sudah terjadi sejak abad pertama kelahiran Islam. Pada abad pertama, sejarah Islam diwarnai dengan gerakan Khawarij yang menganut *absolute truth claim*, dan menganggap bahwa hanya kelompoknyalah yang merupakan manifestasi ideal dari umat Islam sejati, sedang umat Islam di luar dirinya dianggap kafir dan halal dibunuh. Pada perkembangannya, klaim kebenaran absolut semacam ini muncul kembali pada gerakan revivalisme pra-modernis yang berkembang pada abad ke-18 dan melahirkan ragam gerakan-gerakan lain sebagai reaksi terhadap degradasi kepercayaan dan praktik dalam agama populer. Untuk mengembangkan ajaran dan melawan

praktik-praktik yang dianggap tidak sesuai dengan ideologi kelompoknya, gerakan tersebut menggunakan berbagai cara, termasuk cara radikal tidak hanya kepada kelompok di luar agama Islam, tetapi juga kelompok dalam agama Islam itu sendiri.

Tentu problematika pluralitas agama, etnis dan budaya Indonesia ini tidak dapat disebut sebagai satu-satunya tantangan yang harus dihadapi masyarakat Indonesia. Modernisasi yang dialami secara global oleh seluruh masyarakat dunia tak terkecuali Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri yang tidak bisa dinafikan begitu saja.

Dalam konteks Indonesia sendiri, Islam dan negara memang telah menjelma menjadi dua entitas yang sepanjang sejarah kemerdekaan senantiasa mengalami pergumulan. Puncak pergumulan keduanya terjadi ketika diadakan Sidang Majelis Konstituante pada tahun 1956-1959. Di forum itu, terdapat dua persetujuan antara kelompok Islam dan kelompok kebangsaan atau nasionalis sekular (Latif, 2011: 71).

Kelompok Islam berpandangan bahwa negara tidak bisa dipisahkan dari agama, sedangkan golongan kebangsaan berpandangan bahwa negara hendaknya bersikap netral terhadap agama. Permasalahan ini memang pada akhirnya diselesaikan oleh Soekarno dengan mengeluarkan Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945. Namun, hal itu tidak lantas memberikan jaminan bahwa persoalan di sekitar hubungan Islam *vis a vis* negara selesai begitu saja. Sebaliknya, perbincangan tentang persetujuan keduanya menjadi lebih berbobot dan ideologis sejak Konstituante itu. Persetujuan antara Islam dan negara yang dipaksa meredam pada akhirnya meninggalkan dampak negatif yang melahirkan krisis yang ditandai dengan kian memburuknya hubungan antara Islam dan negara. Peristiwa Tanjung Priok merupakan salah satu titik ledak yang tidak terbandung dari akumulasi krisis tersebut.

Bagi Nurcholis Madjid, ide negara Islam merupakan kecenderungan apologetis berhadapan dengan ideologi-ideologi modern Barat seperti demokrasi, sosialisme, komunisme dan lain sebagainya. Apologi terhadap ideologi-ideologi modern ini menimbulkan adanya apresiasi atas Islam yang bersifat ideologis-politis, dan dengan demikian membawa kepada cita-cita negara Islam, sebagaimana juga ada negara demokrasi, negara sosialis, negara komunis dan seterusnya. Menurut Nurcholis, apologi merupakan kompensasi bagi rasa rendah diri berhadapan dengan kehidupan modern yang didominasi oleh pola kehidupan Barat. Maka melalui apresiasi yang bersifat totaliter terhadap Islam, para aktivis Islam ingin membuktikan bahwa Islam ternyata

lebih unggul dari pada peradaban Barat dengan ideologi-ideologi modernnya, dalam hal yang menyangkut ekonomi, politik, sosial dan lain-lain (Hidayat dkk, 2005: xv).

Sampai di sini dapat dipahami, bahwa pluralitas berpotensi untuk melahirkan konflik dan akses negatif dalam berbagai bentuknya. Bahkan tidak jarang berbuah aksi-aksi radikal. Untuk berhasil menghadapi tantangan-tantangan tersebut, masyarakat Islam Indonesia harus terus berusaha menemukan identitas positif dirinya. Usaha ini setidaknya harus berangkat dari tiga titik kesadaran. Kesadaran *pertama*, adalah kesadaran atas realitas pluralitas masyarakat Indonesia dimana pluralitas yang ada diambil nilai profetiknya untuk membangun bangsa. Kesadaran *kedua*, adalah kesadaran bahwa modernitas adalah suatu keniscayaan yang dalam prosesnya mencapai tujuan harus disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Dan kesadaran *ketiga*, adalah kesadaran untuk tetap menjadikan Pancasila sebagai identitas nasional. Berikut, akan dibahas tentang kesadaran tersebut sebagai kerangka konseptual untuk menemukan kembali identitas positif Islam Indonesia.

Meneguhkan Pluralisme: Mencegah Merebaknya Konflik

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Indonesia adalah sebuah negara kebangsaan yang sejak awal tumbuh memang sangat bernuansa heterogen baik etnis maupun agama. Sebagai titik silang antarbenua dan antarsamudera, Indonesia menjadi titik temu bagi proses penyerbukan silang-budaya dari pelbagai arus peradaban dunia. Secara historis, hidup religius dengan kerelaan menerima keragaman semacam ini telah lama diterima sebagai kewajaran oleh penduduk Nusantara. Sejak jaman Majapahit, doktrin agama sipil untuk mensenyawakan keragaman ekspresi keagamaan telah diformulasikan oleh Mpu Tantular dalam *Sutasoma*, "*Binneka Tunggal Ika tan Hana Dharma Mangrwa*", berbeda-beda namun satu, tiada kebenaran yang mendua (Latif, 2011: 56).

Sayangnya, kalimat *Binneka Tunggal Ika* tersebut akhir-akhir ini hanya menjadi diktum kering. Terkurung sebagai jargon nasional yang seakan tidak lagi punya celah untuk dieskpresikan. Buktinya, bangsa Indonesia dalam satu dekade terakhir banyak dihadapkan pada problematika yang mendasar khususnya tentang kerukunan beragama yang terus menerus mengancam konflik-konflik yang mengatasnamakan agama. Di Ambon, Poso dan kota-kota lainnya berulang-ulang terjadi konflik berdimensi agama. Fenomena konflik agama tersebut selain buah dari hilangnya semangat *Binneka Tunggal Ika*, juga merupakan anak biologis dari kecenderungan paradigma beragama

masyarakat yang eksklusif dan superior. Sikap ini jelas-jelas menjadi faktor pendorong munculnya konflik yang tidak saja menodai agama itu sendiri, tetapi juga telah menodai persaudaraan antar manusia.

Dengan demikian, sikap yang paling tepat untuk merespon pluralitas tersebut adalah dengan mengembangkan pluralisme. Pluralisme di sini dapat diartikan sebagai usaha untuk menghargai perbedaan dan mendorong dialog kreatif antara budaya dan visi moral yang berbeda-beda. Berkaitan dengan upaya ini, semboyan *Binneka Tunggal Ika* juga harus menjadi semboyan produktif yang menuntun terbentuknya paradigma beragama masyarakat Indonesia ke arah yang lebih toleran, inklusif dan partisipatif. Pluralitas etnis dan agama tidak boleh menjadi hambatan bagi pembentukan integrasi sosial masyarakat Indonesia, sebaliknya pluralitas tersebut harus menggiring masyarakat menuju kesadaran positif (*critical consciousness*) dan menjadi modal bangsa untuk melalui problem integrasi masyarakat plural. Sehingga akan terwujud masyarakat Islam Indonesia yang toleran dan inklusif ditengah segala realitas pluralitas bangsa Indonesia, dan menjadi salah satu yang memotivasi terhadap pembentukan *nation building* yang kuat dan satu.

Pancasila Sebagai Identitas Bangsa

Pancasila yang oleh Yudi latif disebut-sebut sebagai warisan jenius Nusantara dalam proses sejarah konseptualisasinya melintasi rangkaian panjang fase pembuahan, fase perumusan dan fase pengesahan. Fase pembuahan pancasila setidaknya dirintis sejak tahun 1920 dalam bentuk gagasan-gagasan untuk mencari sintesis antar ideologi dan gerakan, seiring dengan penemuan Indonesia sebagai kode kebangsaan bersama (*civic nationalism*). Fase perumusan dimulai pada masa persidangan pertama BPUK dengan pidato Soekarno (1 Juni) sebagai *creme de la creme*-nya yang menunculkan istilah Pancasila yang digodok melalui pertemuan Chuo Cangi In dengan membentuk panitia sembilan. Fase pengesahan dimulai sejak 18 Agustus 1945 yang mengikat secara konstitusional dalam kehidupan bernegara (Latif, 2011: 39). Setiap fase konseptualisasi Pancasila ini melibatkan partisipasi pelbagai unsur dan golongan. Oleh karena itu, pancasila benar-benar merupakan karya bersama milik bangsa.

Sejak disahkan secara konstitusional pada 18 Agustus 1945, pancasila dapat dikatakan sebagai dasar (falsafah) negara, pandangan hidup, ideologi nasional, dan ligatur (pemersatu) dalam perikehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Singkat kata, Pancasila adalah dasar statis yang

mempersatukan sekaligus bintang penuntun (*leitstar*) yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Dalam posisi seperti itu, Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa (Latif, 2011: 41).

Menurut Nurcholis, berkenaan dengan bangsa Indonesia, Pancasila dipandang sebagai perwujudan etos nasional kita dalam bentuk perumusan formal itu, sehingga sudah sangat lazim dan semestinya bahwa Pancasila disebut sebagai ideologi nasional. Lebih jauh, Pancasila adalah sebuah ideologi modern. Hal ini tidak saja karena ia diwujudkan dalam zaman modern, tapi juga lebih-lebih lagi karena ia ditampilkan oleh seorang atau sekelompok orang dengan wawasan modern, yaitu para bapak pendiri Republik Indonesia, dan dimaksudkan untuk memberi landasan filosofis bersama (*common philosophical ground*) sebuah masyarakat plural yang modern, yaitu masyarakat Indonesia (Madjid dkk, 2007: 166). Maka sebagai karya bersama, Pancasila patut dipandang dan diposisikan sebagai identitas bangsa yang meleburkan perbedaan keagamaan, kesukuan dan kebudayaan. Pancasila harus dipandang sebagai payung hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Kesadaran Pancasila sebagai payung hukum dan identitas bangsa, menuntut pemahaman bahwa dalam kerangka Pancasila, agama mencerminkan komitmen etis bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan publik-politik yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan budi pekerti yang luhur. Pancasila berpretensi menjadikan nilai-nilai moral ini menjadi landasan pengelolaan kehidupan publik-politik dalam konteks masyarakat multikultur-multiagama, tanpa menjadikan salah satu agama (unsur keagamaan) mendikte negara. Dengan komitmen pancasila yang demikian ini, maka Indonesia bukanlah negara sekuler yang ekstrim, yang berpretensi menyudutkan agama agar terisolasi ke ruang privat, namun Indonesia juga bukanlah perwujudan negara agama, yang mempresentasikan salah satu aspirasi kelompok keagamaan saja. Karena, hal itu hanya akan membawa tirani keagamaan yang mematikan pluralitas kebangsaan dan menjadikan pengikut agama lain sebagai warga negara kelas dua (Latif, 2011: 110).

Jika ini bisa dipahami, maka nasionalisme Indonesia akan tumbuh subur di setiap hati masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Islam Indonesia. Sehingga isu politik identitas yang mewakili agama atau suku tertentu akan mudah dileburkan. Persoalan negara *vis a vis* Islam tidak akan lagi menjadi isu krusial yang menyebabkan banyak disintegrasi bangsa. Sebab *otochtonitas* agama –seperti juga disebutkan sebelumnya- tidak hanya akan dibatasi perwujudannya

dalam pembentukan politik legal-formal.

Sebagai produk pemikiran modern, Pancasila adalah sebuah ideologi yang dinamis dan tidak statis. Watak dinamis Pancasila itu membuatnya sebagai ideologi terbuka yang meniscayakan kontekstualisasi secara berkala dalam ranah kebangsaan Indonesia. Kontekstualisasi tersebut dilakukan dengan cara menggali lapis demi lapis alam pikiran Pancasila untuk menangkap semangat dan pokok-pokok pikiran Pancasila, sebagai titik tolak dan tolak ukur bagi penjabaran dan penyesuaiannya dalam perundang-undangan, pilihan-pilihan kebijakan, praktik kenegaraan, dan kehidupan kebangsaan dalam rangka menjawab tantangan aktual yang terus berkembang.

Solusi Praktis Menghadapi Pluralisme di Indonesia

Masyarakat Indonesia harus memiliki wawasan multikultural, perbedaan itu ada, dan tidak harus dilenyapkan. Menghapus perbedaan berarti menghapus pelangi kehidupan. Persoalan bangsa ini adalah bagaimana menyikapi perbedaan yang sangat berwarna-warni dengan cara yang arif dan bijaksana.

Berikut beberapa tawaran solusi untuk menghadapi pluralisme dan mencegah munculnya konflik di Indonesia:

1. Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat melalui jalur pendidikan dan kegiatan kemasyarakatan, tentang pluralisme dan pentingnya toleransi antar umat beragama.
2. Tidak mudah tersulut emosi dengan isu yang tidak jelas terkait masalah sosial dan keagamaan.
3. Para pemimpin dan pemuka agama hendaknya menyepakati kode etik tentang penyiaran agama.
4. Menjalankan dan mentaati undang-undang yang berlaku terkait perlindungan negara atas kerukunan umat beragama.
5. Pemerintah bersama masyarakat harus memiliki komitmen untuk mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama.

Demikian tawaran solusi ini, jika dapat diaplikasikan dan dimaksimalkan, *insyaallah* Indonesia akan selalu damai dalam kemajemukan. Khususnya kepada umat muslim Indonesia, hendaknya menjadi teladan dan panji pembangunan kerukunan umat beragama, sehingga mampu untuk terus meringkai pluralisme dengan al Quran dan Hadits.

Simpulan

Islam telah dengan jelas memberikan petunjuk hidup melalui al Quran dan Hadits, sebagai pedoman bagi masyarakat plural. Pluralisme bukanlah penyamaan agama, namun lebih kepada pemahaman atas legitimasi setiap agama yang berbeda dengan Islam. Sikap menghargai dan memahami orang lain yang berbeda agama akan melahirkan toleransi dan kasih sayang yang kuat atas sesama manusia (*ukhuwah basyariyah*).

Pluralisme, adalah tantangan terbesar yang saat ini dihadapi oleh masyarakat Islam Indonesia. Tantangan tersebut memiliki potensi konstruktif jika dapat direspon dengan sikap positif, namun juga berpotensi destruktif jika direspon dengan sikap negatif.

Landasan sikap untuk menghadapi tantangan tersebut, yaitu dengan cara menumbuhkan kesadaran positif untuk meneguhkan pemahaman pluralisme, mengambil nilai profetik modernisasi serta menjadikan pancasila sebagai identitas bangsa. Sehingga akan terbentuk masyarakat Islam Indonesia yang memiliki karakter toleran, fleksibel, dinamis dan rasional.

Daftar Pustaka

- Al Barry, M. Dahlan dan Partanto, Pius A. 2001. *Kamus Populer Ilmiah*. Surabaya: Arkola Offset.
- Al Quran dan Terjemahannya. 1997. Kudus: Menara Kudus.
- As Shobuni, Ali. 1994. *Shafwah at Tafaasir*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah
- As Suyuti. 1994. *Shofwah al Bayan Li Ma'ani al Quran*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah
- Azra, Azyumardi, dkk. 2005. *Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam: Bingkai Gagasan yang Berserak*. Bandung: Penerbit Nusantara.
- Hidayat, Komaruddin, dkk. 2005 *Islam Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*. Jakarta: Paramadina.
- Kleden, Ignas. 2000. *Pergulatan Pesantren dan Demokrasi*. LkiS: Yogyakarta.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Madjid, Nurcholis, dkk. 2007. *Islam Universal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muammar, M. Arfan, dkk. 2012. *Studi Islam: Perspektif Insider dan Outsider*. Jogjakarta: Ircisod.

Taufiqurrahman. 2013. *Sang Nahkoda: Biografi Suryadharna Ali*. Malang: UIN-Maliki Press.